



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**DINAS SOSIAL**



**RENCANA KERJA**  
**(RENJA) PERUBAHAN**  
**TAHUN 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2024 yang sudah dicapai sampai dengan triwulan II. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan untuk penyempurnaan dalam perencanaan ini. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024.

Ranai, 5 Agustus 2024

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna



**PURYANTI, SP., M.A.P**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750706 200003 2 008

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....</b>	<b>7</b>
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024.....	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
	2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	18
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
<b>BAB III</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANAGKAT DAERAH.....</b>	<b>21</b>
	3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	21
	3.2 Cascading dan Crosscutting.....	21
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>29</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna dan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial;
- c. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Sosial;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.;

Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2024 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah periode 2021 – 2026.

Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 yang sudah dicapai sampai dengan triwulan II. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah diutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna;
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 66);
17. Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna

18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 26);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024;
21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 362).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2024 sebagai berikut:

#### **1. Maksud**

Renja Perubahan Dinas Sosial disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya.

#### **2. Tujuan**

Rencana Kerja Perubahan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2024;
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024;
- c. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2024 sebagai berikut:

- Bab I    Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- Bab II   Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berjalan
- Bab III  Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2024
- Bab IV  Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024.

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024**

Pada Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Natuna telah melaksanakan 6 (enam) Program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Program utama tersebut akan dianalisis realisasi anggaran sampai dengan triwulan II per 28 Juni 2024 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Laporan Realisasi Anggaran Per 28 Juni 2024

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
<b>02. BL</b>		<b>8,061,624,052.00</b>	<b>3,939,365,032.00</b>	<b>4,122,259,020.00</b>	<b>48.87</b>
<b>01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>27,741,200.00</b>	<b>5,837,218.00</b>	<b>21,903,982.00</b>	<b>21.04%</b>
<b>01.2.01.0006.</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>27,741,200.00</b>	<b>5,837,218.00</b>	<b>21,903,982.00</b>	<b>21.04%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2,875,900.00	924,704.00	1,951,196.00	32.15%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,247,700.00	0.00	1,247,700.00	0.00%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	902,600.00	672,500.00	230,100.00	74.51%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300,000.00	300,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,000,000.00	3,940,014.00	16,059,986.00	19.70%
<b>01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3,079,024,776.00</b>	<b>1,905,434,071.00</b>	<b>1,173,590,705.00</b>	<b>61.88%</b>
<b>01.2.02.0001.</b>	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>3,079,024,776.00</b>	<b>1,905,434,071.00</b>	<b>1,173,590,705.00</b>	<b>61.88%</b>
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	909,866,000.00	592,489,100.00	317,376,900.00	65.12%
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	147,199,000.00	60,868,400.00	86,330,600.00	41.35%
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	65,699,000.00	43,737,006.00	21,961,994.00	66.57%
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	16,821,000.00	3,588,032.00	13,232,968.00	21.33%
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	81,688,000.00	50,600,000.00	31,088,000.00	61.94%
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	40,544,000.00	25,120,000.00	15,424,000.00	61.96%
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21,504,000.00	8,880,000.00	12,624,000.00	41.29%
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5,828,000.00	3,515,000.00	2,313,000.00	60.31%
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	45,830,000.00	26,650,560.00	19,179,440.00	58.15%
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9,125,000.00	3,114,060.00	6,010,940.00	34.13%
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	62,097,858.00	35,341,118.00	26,756,740.00	56.91%
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00%
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,000.00	8,288.00	4,712.00	63.75%
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,000.00	1,416.00	1,584.00	47.20%
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	83,319,000.00	45,063,243.00	38,255,757.00	54.09%
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5,295,000.00	2,809,424.00	2,485,576.00	53.06%
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1,974,000.00	1,066,410.00	907,590.00	54.02%
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	225,000.00	107,646.00	117,354.00	47.84%
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5,922,000.00	3,199,228.00	2,722,772.00	54.02%
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	673,000.00	322,924.00	350,076.00	47.98%
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	571,128,016.00	384,991,908.00	186,136,108.00	67.41%
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	43,597,800.00	10,850,000.00	32,747,800.00	24.89%
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	856,966,078.00	577,499,808.00	279,466,270.00	67.39%
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	75,323,100.00	16,282,000.00	59,041,100.00	21.62%
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	18,483,924.00	6,528,500.00	11,955,424.00	35.32%
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8,400,000.00	2,800,000.00	5,600,000.00	33.33%
<b>01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>48,000,000.00</b>	<b>46,576,321.00</b>	<b>1,423,679.00</b>	<b>97.03%</b>
<b>01.2.05.0011.</b>	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>48,000,000.00</b>	<b>46,576,321.00</b>	<b>1,423,679.00</b>	<b>97.03%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,000,000.00	1,600,000.00	1,400,000.00	53.33%
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,000,000.00	29,976,321.00	23,679.00	99.92%
<b>01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>347,223,390.00</b>	<b>100,621,595.00</b>	<b>246,601,795.00</b>	<b>28.98%</b>

<b>01.2.06.0002.</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>68,781,400.00</b>	<b>21,054,900.00</b>	<b>47,726,500.00</b>	<b>30.61%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22,000,000.00	7,474,000.00	14,526,000.00	33.97%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10,383,600.00	3,002,500.00	7,381,100.00	28.92%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19,691,700.00	6,071,000.00	13,620,700.00	30.83%
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11,106,100.00	2,683,400.00	8,422,700.00	24.16%
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5,000,000.00	1,824,000.00	3,176,000.00	36.48%
<b>01.2.06.0004.</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>8,427,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,427,000.00</b>	<b>0.00%</b>
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	8,427,000.00	0.00	8,427,000.00	0.00%
<b>01.2.06.0005.</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>23,083,000.00</b>	<b>9,621,400.00</b>	<b>13,461,600.00</b>	<b>41.68%</b>
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8,826,000.00	3,330,000.00	5,496,000.00	37.73%
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4,257,000.00	1,502,000.00	2,755,000.00	35.28%

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	10,000,000.00	4,789,400.00	5,210,600.00	47.89%
<b>01.2.06.0006.</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00%
<b>01.2.06.0009.</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>229,966,090.00</b>	<b>68,445,295.00</b>	<b>161,520,795.00</b>	<b>29.76%</b>
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,700,000.00	5,833,600.00	9,866,400.00	37.16%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	116,146,090.00	32,221,695.00	83,924,395.00	27.74%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	98,120,000.00	30,390,000.00	67,730,000.00	30.97%
<b>01.2.06.0010.</b>	<b>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>	<b>4,965,900.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>3,465,900.00</b>	<b>30.21%</b>
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,500,000.00	816,000.00	2,684,000.00	23.31%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,465,900.00	684,000.00	781,900.00	46.66%
<b>01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>51,800,000.00</b>	<b>30,926,668.00</b>	<b>20,873,332.00</b>	<b>59.70%</b>
<b>01.2.07.0005.</b>	<b>Pengadaan Mebel</b>	<b>21,663,000.00</b>	<b>1,726,668.00</b>	<b>19,936,332.00</b>	<b>7.97%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5,000,000.00	1,726,668.00	3,273,332.00	34.53%
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	16,663,000.00	0.00	16,663,000.00	0.00%
<b>01.2.07.0006.</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>27,137,000.00</b>	<b>26,200,000.00</b>	<b>937,000.00</b>	<b>96.55%</b>
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3,125,000.00	2,950,000.00	175,000.00	94.40%
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	24,012,000.00	23,250,000.00	762,000.00	96.83%
<b>01.2.07.0007.</b>	<b>Pengadaan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	00.00%
<b>01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>239,321,646.00</b>	<b>128,346,596.00</b>	<b>110,975,050.00</b>	<b>53.63%</b>
<b>01.2.08.0001.</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>27,000,000.00</b>	<b>12,490,488.00</b>	<b>14,509,512.00</b>	<b>46.26%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15,000,000.00	6,222,488.00	8,777,512.00	41.48%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10,000,000.00	5,500,000.00	4,500,000.00	55.00%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2,000,000.00	768,000.00	1,232,000.00	38.40%
<b>01.2.08.0002.</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>1,696,356.00</b>	<b>232,500.00</b>	<b>1,463,856.00</b>	<b>13.71%</b>
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	497,000.00	232,500.00	264,500.00	46.78%
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	1,199,356.00	0.00	1,199,356.00	0.00%
<b>01.2.08.0004.</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>210,625,290.00</b>	<b>115,623,608.00</b>	<b>95,001,682.00</b>	<b>54.90%</b>
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	142,000,000.00	89,200,000.00	52,800,000.00	62.82%
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40,400,000.00	13,500,000.00	26,900,000.00	33.42%
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10,000,000.00	5,500,000.00	4,500,000.00	55.00%
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	15,525,290.00	6,540,624.00	8,984,666.00	42.13%
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1,150,000.00	392,436.00	757,564.00	34.12%
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,550,000.00	490,548.00	1,059,452.00	31.65%
<b>01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>125,368,120.00</b>	<b>56,567,186.00</b>	<b>68,800,934.00</b>	<b>45.12%</b>
<b>01.2.09.0002.</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>65,592,120.00</b>	<b>52,367,186.00</b>	<b>13,224,934.00</b>	<b>79.84%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8,369,620.00	4,178,936.00	4,190,684.00	49.93%
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	40,522,500.00	38,648,250.00	1,874,250.00	95.37%
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7,000,000.00	4,740,000.00	2,260,000.00	67.71%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00%
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00%
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5,000,000.00	4,800,000.00	200,000.00	96.00%
<b>01.2.09.0006.</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>4,200,000.00</b>	<b>5,800,000.00</b>	<b>42.00%</b>
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6,000,000.00	2,400,000.00	3,600,000.00	40.00%
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4,000,000.00	1,800,000.00	2,200,000.00	45.00%
<b>01.2.09.0011.</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>49,776,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,776,000.00</b>	<b>0.00%</b>
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat	49,776,000.00	0.00	49,776,000.00	0.00%

	Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
<b>02.2.03.</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25,825,300.00</b>	<b>860,848.00</b>	<b>24,964,452.00</b>	<b>3.33%</b>
<b>02.2.03.0005.</b>	<b>Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)</b>	<b>25,825,300.00</b>	<b>860,848.00</b>	<b>24,964,452.00</b>	<b>3.33%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2,802,500.00	860,848.00	1,941,652.00	30.72%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	565,700.00	0.00	565,700.00	0.00%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	461,700.00	0.00	461,700.00	0.00%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00%
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,750,000.00	0.00	8,750,000.00	0.00%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	620,400.00	0.00	620,400.00	0.00%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,805,000.00	0.00	9,805,000.00	0.00%
<b>04.2.01.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>1,232,522,620.00</b>	<b>632,934,006.00</b>	<b>599,588,614.00</b>	<b>51.35%</b>
<b>04.2.01.0001.</b>	<b>Penyediaan Permakanan</b>	<b>6,480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,480,000.00</b>	<b>0.00%</b>

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00	0.00%
<b>04.2.01.0002.</b>	<b>Penyediaan Sandang</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00%
<b>04.2.01.0003.</b>	<b>Penyediaan Alat Bantu</b>	<b>827,661,006.00</b>	<b>566,025,300.00</b>	<b>261,635,706.00</b>	<b>68.39%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	32,180,951.00	9,427,500.00	22,753,451.00	29.30%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,985,400.00	662,000.00	1,323,400.00	33.34%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,332,100.00	499,800.00	832,300.00	37.52%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,640,000.00	896,000.00	744,000.00	54.63%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,800,000.00	800,000.00	2,000,000.00	28.57%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3,200,000.00	1,232,000.00	1,968,000.00	38.50%
5.1.02.02.04.0039.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00%
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	7,208,000.00	0.00	7,208,000.00	0.00%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1,500,000.00	217,000.00	1,283,000.00	14.47%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79,976,200.00	0.00	79,976,200.00	0.00%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	73,438,355.00	46,191,000.00	27,247,355.00	62.90%
5.1.06.01.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	618,000,000.00	506,100,000.00	111,900,000.00	81.89%
<b>04.2.01.0005.</b>	<b>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</b>	<b>18,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,500,000.00</b>	<b>0.00%</b>
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00%
<b>04.2.01.0006.</b>	<b>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</b>	<b>14,240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,240,000.00</b>	<b>0.00%</b>
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,690,000.00	0.00	9,690,000.00	0.00%
<b>04.2.01.0011.</b>	<b>Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga</b>	<b>72,700,450.00</b>	<b>10,124,207.00</b>	<b>62,576,243.00</b>	<b>13.93%</b>
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60,880,450.00	10,124,207.00	50,756,243.00	16.63%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,820,000.00	0.00	11,820,000.00	0.00%
<b>04.2.01.0012.</b>	<b>Pemberian Layanan Rujukan</b>	<b>282,941,164.00</b>	<b>56,784,499.00</b>	<b>226,156,665.00</b>	<b>20.07%</b>
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,079,500.00	242,600.00	1,836,900.00	11.67%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,135,000.00	480,000.00	655,000.00	42.29%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	910,000.00	448,000.00	462,000.00	49.23%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,900,000.00	900,000.00	1,000,000.00	47.37%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00%
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	233,193,322.00	52,853,899.00	180,339,423.00	22.67%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36,653,342.00	1,860,000.00	34,793,342.00	5.07%
<b>05.2.02.</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2,441,007,000.00</b>	<b>956,290,171.00</b>	<b>1,484,716,829.00</b>	<b>39.18%</b>
<b>05.2.02.0003.</b>	<b>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>2,041,011,900.00</b>	<b>944,812,116.00</b>	<b>1,096,199,784.00</b>	<b>46.29%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	43,581,300.00	11,338,000.00	32,243,300.00	26.02%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,250,200.00	504,000.00	1,746,200.00	22.40%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,473,600.00	568,500.00	905,100.00	38.58%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,540,000.00	1,128,900.00	411,100.00	73.31%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,500,000.00	800,000.00	700,000.00	53.33%

5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	810,000.00	575,000.00	235,000.00	70.99%
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	101,400,000.00	50,100,000.00	51,300,000.00	49.41%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4,250,000.00	3,696,000.00	554,000.00	86.96%
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	53,360,000.00	26,200,000.00	27,160,000.00	49.10%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	2,176,800.00	1,295,000.00	881,800.00	59.49%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	114,000,000.00	31,042,716.00	82,957,284.00	27.23%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	113,870,000.00	43,564,000.00	70,306,000.00	38.26%
5.1.06.02.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1,600,800,000.00	774,000,000.00	826,800,000.00	48.35%
<b>05.2.02.0004.</b>	<b>Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</b>	<b>399,995,100.00</b>	<b>11,478,055.00</b>	<b>388,517,045.00</b>	<b>2.87%</b>
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	987,200.00	478,800.00	508,400.00	48.50%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	607,900.00	450,000.00	157,900.00	74.03%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00%
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	10,500,000.00	3,150,000.00	7,350,000.00	30.00%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,500,000.00	7,399,255.00	18,100,745.00	29.02%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00%
5.1.06.02.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	352,000,000.00	0.00	352,000,000.00	0.00%
<b>06.2.01.</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>62,272,145.00</b>	<b>237,727,855.00</b>	<b>20.76%</b>
<b>06.2.01.0001.</b>	<b>Penyediaan Makanan</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>62,272,145.00</b>	<b>237,727,855.00</b>	<b>20.76%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24,940,675.00	8,311,000.00	16,629,675.00	33.32%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,696,600.00	426,900.00	1,269,700.00	25.16%

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,385,100.00	456,000.00	929,100.00	32.92%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	980,000.00	330,000.00	650,000.00	33.67%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,400,000.00	500,000.00	900,000.00	35.71%
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	30,665,625.00	30,665,625.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	150,070,000.00	0.00	150,070,000.00	0.00%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2,736,000.00	912,000.00	1,824,000.00	33.33%
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	15,000,000.00	6,870,270.00	8,129,730.00	45.80%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1,804,000.00	357,350.00	1,446,650.00	19.81%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,142,000.00	13,443,000.00	36,699,000.00	26.81%
<b>06.2.02.</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>10,537,539.00</b>	<b>89,462,461.00</b>	<b>10.54%</b>
<b>06.2.02.0001.</b>	<b>Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>10,537,539.00</b>	<b>89,462,461.00</b>	<b>10.54%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9,100,960.00	3,333,332.00	5,767,628.00	36.63%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	789,800.00	0.00	789,800.00	0.00%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,262,000.00	0.00	1,262,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	13,810,000.00	0.00	13,810,000.00	0.00%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00%
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3,980,000.00	0.00	3,980,000.00	0.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48,077,240.00	7,204,207.00	40,873,033.00	14.98%
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00%
<b>07.2.01.</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>43,790,000.00</b>	<b>2,160,668.00</b>	<b>41,629,332.00</b>	<b>4.93%</b>
<b>07.2.01.0002.</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>43,790,000.00</b>	<b>2,160,668.00</b>	<b>41,629,332.00</b>	<b>4.93%</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,529,000.00	1,459,668.00	2,069,332.00	41.36%
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	748,800.00	0.00	748,800.00	0.00%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	724,500.00	0.00	724,500.00	0.00%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	923,400.00	0.00	923,400.00	0.00%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2,764,300.00	701,000.00	2,063,300.00	25.36%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00%
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00%
5.1.02.03.03.0052.	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	0.00%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,061,624,052.00</b>	<b>3,939,365,032.00</b>	<b>4,122,259,020.00</b>	<b>48.87%</b>

Dari Tabel 2.1 diatas dapat dilihat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 28 Juni 2024 menjelaskan bahwa 6 (enam) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2023 telah terealisasi sebesar 48,87%. Sedangkan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 76,80% dari target kinerja sebesar 51,13%.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2024 terlihat pada Tabel 2.2 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Triwulan II Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP 2024 Triwulan I		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP 2024 S/D Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	79.50	8,061,624,052.00	78.05	2,091,088,846.00	78.05	1,848,276,186.00	78.05	3,939,365,032	98.18	48.87		
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	27,741,200.00	100	5,374,866.00	100	462,352.00	100.00	5,837,218	100.00	21.04		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	27,741,200.00	2	5,374,866.00	0	462,352.00	2	5,837,218	100.00	21.04		
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3,890,737,932.00	85	1,078,436,092.00	85	1,190,036,345.00	85.00	2,268,472,437	100.00	58.30		
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3,079,024,776.00	1	926,681,221.00	1	978,752,850.00	1	1,905,434,071	100.00	61.88		
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	3,079,024,776.00	22	926,681,221.00	22	978,752,850.00	22	1,905,434,071	104.76	61.88		
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	14.29	48,000,000.00	0	800,000.00	13.63	45,776,321.00	13.63	46,576,321	95.38	97.03		
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	48,000,000.00	0	800,000.00	3	45,776,321.00	3	46,576,321	100.00	97.03		
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	347,223,390.00	75	45,528,271.00	75	55,093,324.00	75	100,621,595	100.00	28.98		
10	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	68,781,400.00	4	11,038,400.00	4	10,016,500.00	4	21,054,900	100.00	30.61		

11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	8,427,000.00	0	0.00	0	0.00	0	-	0.00	0.00		
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	23,083,000.00	3	5,720,250.00	3	3,901,150.00	3	9,621,400	100.00	41.68		
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	12,000,000.00	0	0.00	1	0.00	0	-	0.00	0.00		
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	229,966,090.00	15	0.00	16	39,675,674.00	31	39,675,674	44.29	17.25		
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6	4,965,900.00	6	0.00	6	1,500,000.00	6.00	1,500,000	100.00	30.21		
16	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah</b>	<b>60</b>	<b>51,800,000.00</b>	<b>60.18</b>	<b>863,334.00</b>	<b>60.18</b>	<b>30,063,334.00</b>	<b>60.18</b>	<b>30,926,668</b>	<b>100.30</b>	<b>59.70</b>		
17	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	21,663,000.00	0	0.00	1	863,334.00	1.00	863,334	100.00	3.99		
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	27,137,000.00	6	0.00	0	26,200,000.00	6	26,200,000	75.00	96.55		
19	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	3,000,000.00	0	0.00	1	3,000,000.00	1	3,000,000	100.00	100.00		
20	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran</b>	<b>70</b>	<b>239,321,646.00</b>	<b>70</b>	<b>59,533,548.00</b>	<b>70</b>	<b>68,813,048.00</b>	<b>70.00</b>	<b>128,346,596</b>	<b>100.00</b>	<b>53.63</b>		
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	27,000,000.00	1	5,995,244.00	1	6,495,244.00	1	12,490,488	100.00	46.26		
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1,696,356.00	1	26,500.00	1	206,000.00	1	232,500	100.00	13.71		
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	210,625,290.00	3	53,511,804.00	3	62,111,804.00	6.00	115,623,608	50.00	54.90		
24	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran</b>	<b>75</b>	<b>125,368,120.00</b>	<b>75</b>	<b>45,029,718.00</b>	<b>75</b>	<b>11,537,468.00</b>	<b>75</b>	<b>56,567,186</b>	<b>100.00</b>	<b>45.12</b>		
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	65,592,120.00	3	42,329,718.00	3	10,037,468.00	3	52,367,186	100.00	79.84		
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	5	10,000,000.00	2	2,700,000.00	3	1,500,000.00	5	4,200,000	100.00	42.00		
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	49,776,000.00	0	0.00	1	0.00	1.00	-	100.00	0.00		

28	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PEMBERDAYAAN SOSIAL	50	25,825,300.00	50	25,825,300.00	50	430,424.00	50.00	26,255,724	100.00	101.67		
29	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	6	25,825,300.00	6	430,424.00	6	430,424.00	6	860,848	100.00	3.33		
30	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	25,825,300.00	0	430,424.00	1	430,424.00	1	860,848	100.00	3.33		
31	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial (%)	100	1,232,522,620.00	100	523,807,207.00	100	109,126,799.00	100	632,934,006	100.00	51.35		
32	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya (%)	100	1,232,522,620.00	100	523,807,207.00	100	109,126,799.00	100.00	632,934,006	100.00	51.35		
33	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	6,480,000.00	0	0.00	0	0.00	0.00	-	0.00	0.00		
34	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	-	0.00	0.00		
35	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	243	827,661,006.00	240	513,683,000.00	0	52,342,300.00	240.00	566,025,300	98.77	68.39		

36	Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	18,500,000.00	0	0.00	0	0.00	0.00	-	0.00	0.00		
37	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	14,240,000.00	0	0.00	0	0.00	0	-	0.00	0.00		
38	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	72,700,450.00	0	10,124,207.00	0	0.00	0.00	10,124,207	0.00	13.93		
39	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	282,941,164.00	4	0.00	0	56,784,499.00	4.00	56,784,499	80.00	20.07		
40	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS</b>	<b>59.84</b>	<b>2,441,007,000.00</b>	<b>95.28</b>	<b>455,794,050.00</b>	<b>93.28</b>	<b>500,496,121.00</b>	<b>93.28</b>	<b>956,290,171</b>	<b>155.88</b>	<b>39.18</b>		
41	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Desa/Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>71.42</b>	<b>2,441,007,000.00</b>	<b>100</b>	<b>455,794,050.00</b>	<b>100</b>	<b>500,496,121.00</b>	<b>100</b>	<b>956,290,171</b>	<b>140.02</b>	<b>39.18</b>		
42	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4749	2,041,011,900.00	4645	445,244,795.00	4636	499,567,321.00	4,636	944,812,116	97.62	46.29		
43	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	88	399,995,100.00	0	10,549,255.00	0	928,800.00	0	11,478,055	0.00	2.87		

44	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	300,000,000.00	100	16,944,500.00	100	45,327,645.00	100	62,272,145	100.00	20.76		
45	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial (%)	100	300,000,000.00	100	16,944,500.00	100	45,327,645.00	100	62,272,145	100.00	20.76		
46	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	300,000,000.00	17	16,944,500.00	8	45,327,645.00	25	62,272,145	250.00	20.76		
47	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana (Desa)	1	100,000,000.00	1	8,870,873.00	1	1,666,666.00	1	10,537,539	100.00	10.54		
48	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1	100,000,000.00	0	8,870,873.00	0	1,666,666.00	0	10,537,539	0.00	10.54		
49	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100	43,790,000.00	100	1,430,834.00	100	729,834.00	100	2,160,668	100.00	4.93		
50	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100	43,790,000.00	100	1,430,834.00	100	729,834.00	100	2,160,668	100.00	4.93		
51	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	11	43,790,000.00	11	1,430,834.00	11	729,834.00	11	2,160,668	100.00	4.93		
	Rata-rata Program										96.61	46.44	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan										103.1	38.27	ST	SR
	Rata-rata Sub kegiatan										67.65	29.94	S	SR

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan II pada Tahun 2024 secara keseluruhan relatif baik. Berdasarkan evaluasi renja Dinas Sosial Triwulan II tahun anggaran 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

### **1. Sekretariat**

Terdapat satu Program dengan dua Indikator Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator (1) Nilai Laporan LKjIP dengan target 79.50% telah teralisasi 78.05% dengan capaian 98,18%, dan (2) Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP dengan target 85% teralisasi 85% dengan capaian 100%. Sehingga Program tersebut telah terealisasi dengan rata-rata capaian sebesar 99,09%. Dari beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan di Sekretariat, ada beberapa sub kegiatan yang belum terlaksana diantaranya pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dikarenakan kegiatan tersebut akan dirasionalisasikan pada anggaran perubahan.

### **2. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

Terdapat tiga Program dan tiga Indikator Program, yaitu (1) Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator program Persentase Pemberdayaan Sosial dengan target 50% teralisasi 50% dengan capaian 100%, (2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS dengan target 59,84% telah teralisasi 93,28% dengan capaian 155,88%, (3) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan target 100% teralisasi 100% dengan capaian 100%. Sehingga dari ketiga Program tersebut telah teralisasi dengan rata-rata capaian sebesar 118,63%.

### **3. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Terdapat dua Program dengan dua indikator Program yaitu (1) Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator Persentase Rehabilitasi Sosial dengan target 100% telah teralisasi 100% dengan capaian 100%, (2) Program Penanganan Bencana dengan indikator Persentase Korban

Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya dengan target 100% telah teralisasi 100% dengan capaian 100%.

Secara umum realisasi Kinerja Program pada Dinas Sosial Kabupaten Natuna triwulan II tahun anggaran 2023 sangat memuaskan, rata-rata capaian program kinerja pada triwulan II diperoleh 109,01% Sedangkan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 48,87%.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024 sampai dengan triwulan II dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Capaian Indikator Sasaran Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	51,13	76,80	150%

Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat dilihat bahwa Indikator Sasaran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah teralisasi 76,80% dengan capaian 150% dan telah melebihi target.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
  - Masih tingginya masalah sosial masyarakat yang belum tertangani
  - Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan menjadi permasalahan sosial di daerah dan nasional
  - Banyaknya jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, tetapi cakupannya penanganannya masih rendah
  - Terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan dalam upaya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Natuna yang berbentuk kepulauan
  - Belum optimalnya pemberdayaan PSKS.
- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
  - Adanya perubahan kebijakan dari tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah
  - Kurangnya sinkronisasi regulasi yang ada baik antara Kementerian Sosial, OPD terkait dan regulasi daerah
  - Kurangnya SDM dan personil yang menangani permasalahan sosial secara khusus
- c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:
  - Adanya dukungan Program dan Anggaran baik dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendorong program percepatan pengentasan kemiskinan di daerah khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya.
  - Kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam hal perlindungan sosial

- Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan dasar

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagai berikut :

- Masih tingginya masalah kesejahteraan sosial
- Belum optimalnya pemberdayaan PSKS
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung PPKS

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Natuna tahun 2024, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada Urusan Sosial yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026;
- b. Mengarah pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026.

Pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 terdapat 1 (satu) penambahan Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan, pada Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan Kegiatan Pendampingan PKH yang terlatih modul kesehatan dan gizi sebagai pemetaan program dalam upaya untuk pemenuhan indikator Prevalensi Stunting maka perlu dilaksanakannya pelatihan bagi Pendamping Program PKH. Secara rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2024 tertuang dalam Lampiran I (Tabel Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025).

#### **3.2 Cascading dan Crosscutting**

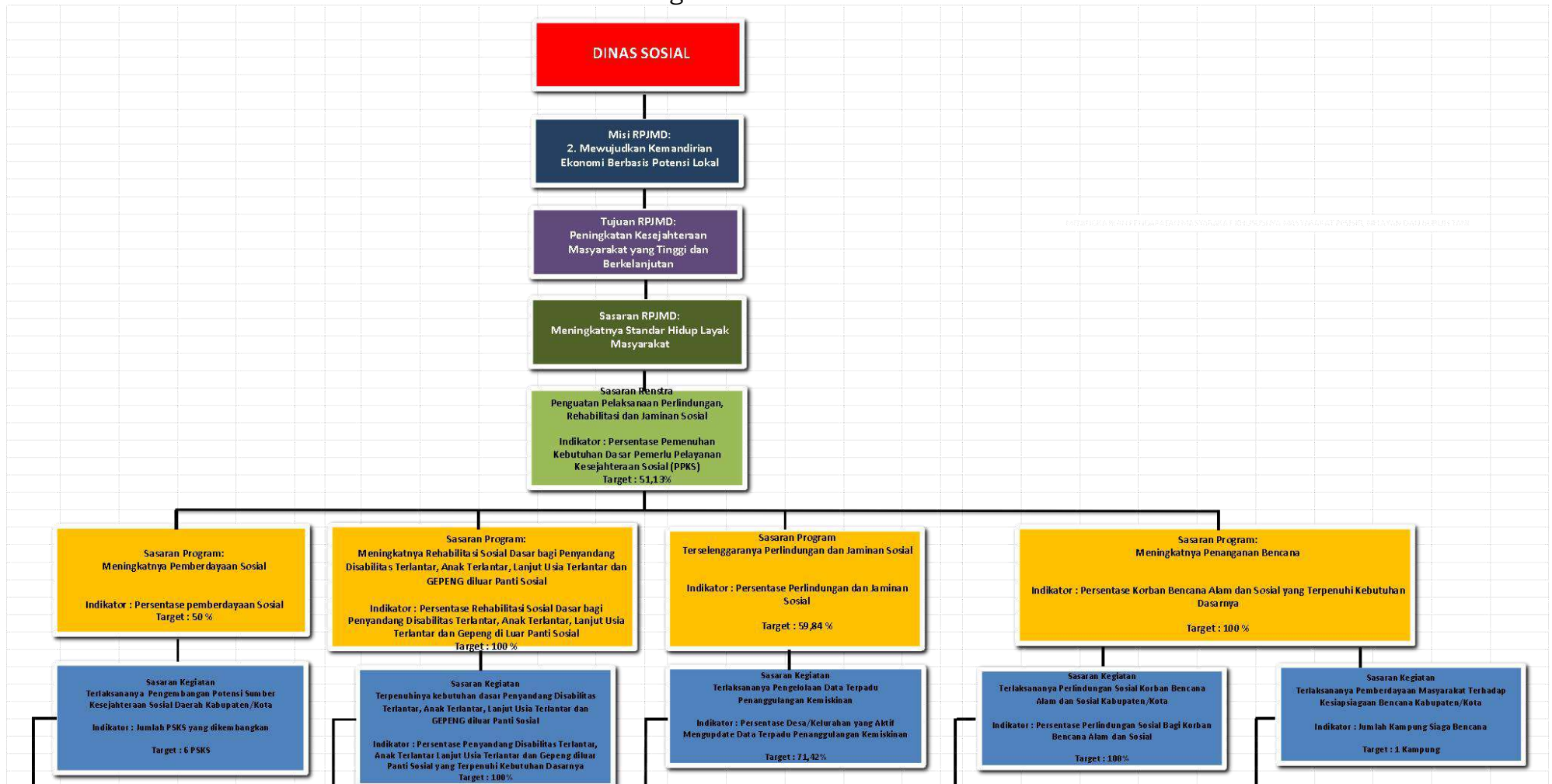
Salah satu sub komponen dalam perencanaan adalah mengukur sejauh mana Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (Cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (Crosscutting). Cascading Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih

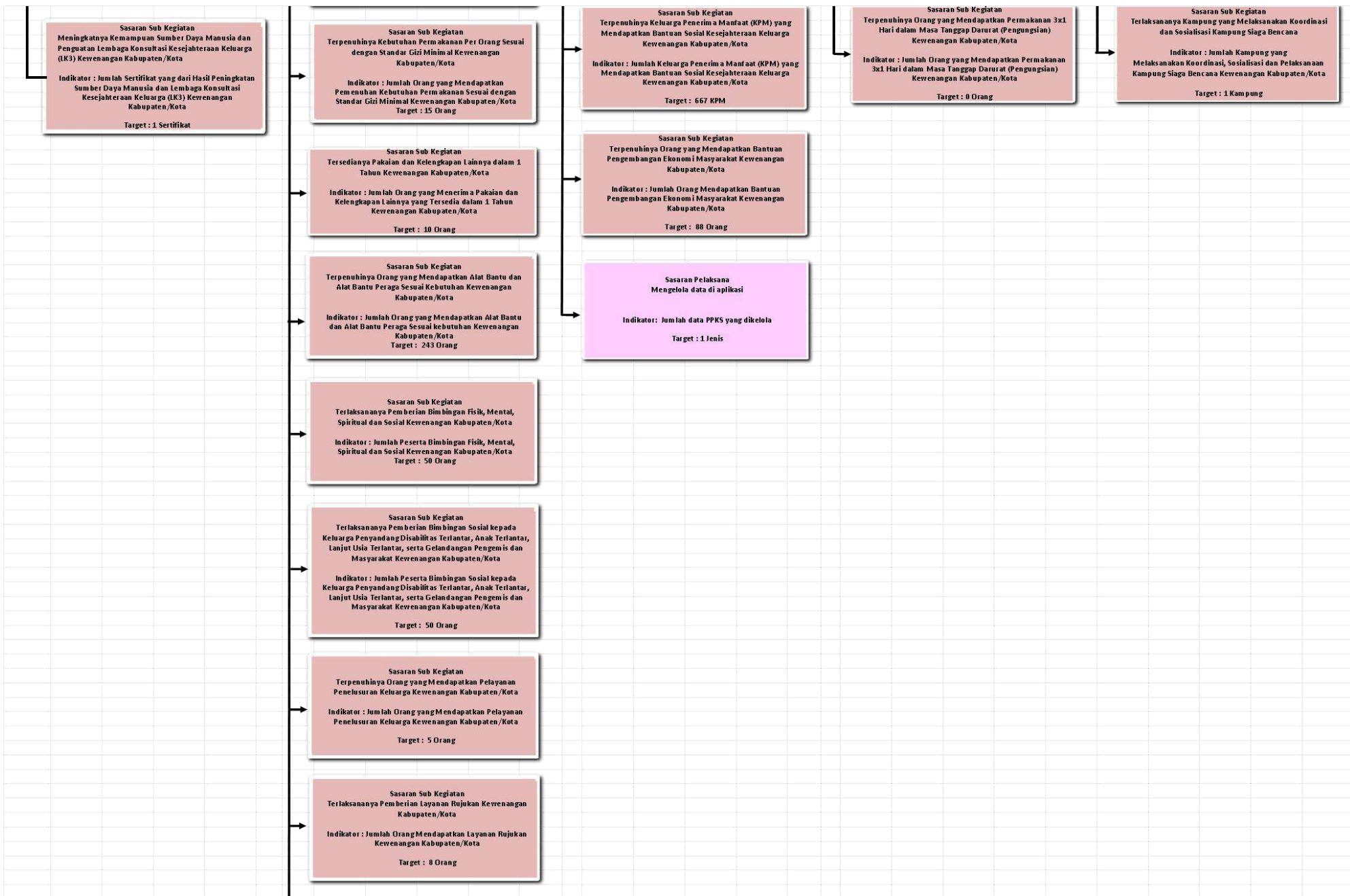
tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran II (Cascading Dinas Sosial Tahun 2024), sedangkan Crosscutting Dinas Sosial Tahun 2024 menggambarkan pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang beririsan secara horizontal tidak selalu secara vertikal (secara hirarki struktural) sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh. Bagan Cross Cutting dapat dilihat pada Lampiran III (Crosscutting Kinerja Program pada Dinas Sosial Tahun 2024).



2	1	06	02		PROG RAMPANG BINA BANGUNAN KOSIAL	Revisi rencana pembangunan kosial				30	Revisi	30.000.000,00	2.522.520,00	30.222.520,00				140.300.000,00
1	06	02	3.02		Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				4	PSIC	30.000.000,00	2.522.520,00	2.522.520,00				140.300.000,00
1	06	02	3.02	000	Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				30	Orang	0,00	0,00	60.300.000,00	0,00	60.300.000,00	0,00	60.300.000,00
1	06	02	3.02	0000	Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				150	Orang	30.000.000,00	2.522.520,00	30.222.520,00	0,00	30.222.520,00	0,00	30.222.520,00
3	1	06	04		PROG RAMPANG BINA BANGUNAN KOSIAL	Revisi rencana pembangunan kosial				300	Revisi	380.000.000,00	1.222.322.420,00	1.222.322.420,00				420.000.000,00
1	06	04	3.04		Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				300	Revisi	480.000.000,00	1.222.322.420,00	1.222.322.420,00				420.000.000,00
1	06	04	3.04	000	Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				130	Orang	30.000.000,00	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	6.420.000,00	0,00	30.000.000,00
1	06	04	3.04	000	Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				300	Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1	06	04	3.04	0000	Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				300	Orang	130.000.000,00	227.661.008,00	227.661.008,00	0,00	227.661.008,00	0,00	130.000.000,00
1	06	04	3.04	0000	Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				300	Orang	30.000.000,00	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	32.300.000,00	0,00	30.000.000,00
1	06	04	3.04	000	Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				300	Orang	30.000.000,00	14.240.000,00	14.240.000,00	0,00	14.240.000,00	0,00	30.000.000,00
1	06	04	3.04	0001	Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				300	Orang	30.000.000,00	72.700.450,00	72.700.450,00	0,00	72.700.450,00	0,00	30.000.000,00
1	06	04	3.04	0002	Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				300	Orang	300.000.000,00	222.841.584,00	222.841.584,00	0,00	222.841.584,00	0,00	300.000.000,00
1	06	04	3.04		Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00				30.000.000,00
1	06	04	3.04	0000	Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				250	Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
4	1	06	05		PROG RAMPANG BINA BANGUNAN KOSIAL	Revisi rencana pembangunan kosial				30	PSIC	230.000.000,00	2.441.007.000,00	2.441.007.000,00				230.000.000,00
1	06	05	3.05		Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				7	PSIC	230.000.000,00	2.441.007.000,00	2.441.007.000,00				230.000.000,00
1	06	05	3.05	000	Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				247	Orang	130.000.000,00	2.041.011.800,00	2.041.011.800,00	0,00	2.041.011.800,00	0,00	130.000.000,00
1	06	05	3.05	0000	Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				300	Orang	300.000.000,00	399.995.200,00	399.995.200,00	0,00	399.995.200,00	0,00	300.000.000,00
3	1	06	06		PROG RAMPANG BINA BANGUNAN KOSIAL	Revisi rencana pembangunan kosial				300	Revisi	230.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00				230.000.000,00
1	06	06	3.06		Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				300	Revisi	130.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00				130.000.000,00
1	06	06	3.06	000	Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				0	Orang	30.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1	06	06	3.06	0000	Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				0	Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1	06	06	3.06	0000	Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				0	Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1	06	06	3.06	0000	Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				0	Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
4	1	06	07		PROG RAMPANG BINA BANGUNAN KOSIAL	Revisi rencana pembangunan kosial				300	Revisi	30.000.000,00	42.790.000,00	42.790.000,00				30.000.000,00
1	06	07	3.07		Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				300	Revisi	30.000.000,00	42.790.000,00	42.790.000,00				30.000.000,00
1	06	07	3.07	000	Perbaikan dan renovasi rumah kosial di lingkungan perumahan kosial	Jumlah anggaran yang akan digunakan				11	Orang	30.000.000,00	42.790.000,00	42.790.000,00	0,00	42.790.000,00	0,00	30.000.000,00
												3.238.827.100	106.142.000,00	3.344.969.100,00				5.822.240.000,00

### Cascading Dinas Sosial Tahun 2024





Sasaran Pelaksana  
Menganalisa Dokumen Rehabilitasi Sosial

Indikator: Jumlah Dokumen Rehabilitasi Sosial

Target : 3 Dokumen

Sasaran Pelaksana  
Mengadministrasi Dokumen Rehabilitasi Sosial

Indikator: Jumlah Dokumen Rehabilitasi Sosial

Target : 3 Dokumen



## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan urusan sosial yang bermanfaat guna mendukung pencapaian Visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pejabat struktural di Dinas Sosial agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2024 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2024 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2024.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Sosial melaksanakan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja tahun 2024 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan sosial diharapkan akan

lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan sosial. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2024 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Ranai, 5 Agustus 2024

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna



**PURYANTI, SP., M.A.P**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750706 200003 2 008